

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi, entitas atau perusahaan harus meneliti pengelolaan yang baik, manajemen berperan penting dalam mengolah informasi yang dibutuhkan dan di peroleh oleh perusahaan atau entitas untuk mengambil keputusan. Untuk mendapatkan keputusan yang baik diperlukan sistem informasi akuntansi yang merupakan salah satu bagian dari sistem informasi manajemen.

Bagi Krismiaji (2010:4) sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengerjakan informasi serta bisnis buat menciptakan data yang berguna untuk merancang, mengatur, serta melaksanakan bidang usaha. Sistem informasi merupakan sesuatu bagian yang menggolongkan, mengakulasi, memasak, menganalisa, serta mengombinasikan data finansial yang relavan buat pengumpulan ketetapan Baritwan(2013: 4). Sistem akuntansi yang terdapat di perusahaan ataupun badan mencakup sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi pinjaman, sistem akuntansi penggajian, sistem pendapatan, sistem akuntansi pembayaran serta lain lain.

Pembangunan daerah ialah bagian yang integral dari pembangunan nasional, yang bermaksud buat tingkatan biaya hidup warga, bagus moril ataupun material. Pembangunan daerah ialah usaha pendapatan target pembangunan nasional di wilayah cocok dengan kemampuan, harapan, serta prioritas dalam menyelenggarakan pembangunan wilayah. Dalam menyelenggarakan pembangunan itu penguasa butuh mencermati posisi serta keragaman wilayah. Kedudukan warga dari modal pendukung serta panganjur amat dibutuhkan dalam pembangunan untuk mensejahterakan warga itu sendiri.

Penerimaan pajak daerah ialah salah satu pangkal anggaran yang berarti untuk pembiayaan pembangunan di wilayah. Fiskal wilayah di Indonesia bagi UU Nomor. 28 tahun 2009 merupakan iuran harus yang dicoba oleh orang individu ataupun tubuh kepala wilayah tanpa balasan langsung yang balance, yang bisa dipaksakan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang legal, serta bisa dipakai buat membantu penajaan penguasa serta pembangunan wilayah untuk menguatkan terwujudnya independensi wilayah yang besar, jelas serta bertanggung jawab. Fiskal wilayah dibagi 2, ialah fiskal provinsi serta fiskal kabupaten ataupun kota. Fiskal provinsi terdiri dari alat transportasi bermotor serta alat transportasi diatas air, banderol balik julukan alat transportasi bermotor serta fiskal pengumpulan serta eksploitasi air dasar tanah serta air dataran. Fiskal kabupaten ataupun kota terdiri dari fiskal penginapan, fiskal restoran, fiskal hiburan, fiskal iklan, fiskal pencerahan jalur, fiskal pengumpulan serta pengerjaan denah galian kalangan C serta fiskal parkir. Dengan berlakunya Hukum No 28 tahun 2009 mengenai Fiskal Wilayah serta Pungutan Wilayah, hingga fiskal restoran ialah sala satu tipe fiskal yang jadi wewenang penguasa kabupaten ataupun kota.

Pajak restoran dipungut atas tiap jasa yang diadakan direstoran, mencakup jasa pemasaran makan serta minuman yang mengkonsumsi di tempat jasa ataupun ditempat lain. Restoran merupakan sarana fasilitator santapan serta atau ataupun minuman dengan dipungut biaya, yang melingkupi rumah makan, kafetaria, kedai, gerai, kafe, serta sejenisnya tercantum pelayanan boga ataupun catering. Yang mendasari keberadaan fiskal restoran di kota Padang Panjang merupakan Peraturan Wilayah Kota Padang Jauh No 1 tahun 2011.

Membayar pajak ialah peranan tiap masyarakat negeri namun pada prakteknya tiap orang sungkan buat melunasi fiskal. Pembayaran fiskal di kota padang jauh dipungut bersumber pada omzet wiraswasta restoran itu. Perihal ini diatur dalam perda kota padang jauh no 1 tahun 2018 pasal 17 yang bersuara bayaran pajak restoran diresmikan bagaikan berikut:

- a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); dan
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran warbala yang nilai penjualannya lebih dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen).

Namun pada prakteknya sebagian pengusaha restoran yang berada di kota padang panjang tidak melaporkan omzetnya dengan sebenarnya sehingga pembayaran pajak pengusaha tersebut jadi berkurang. Dengan memperhatikan hal diatas maka penulis tertarik buat menekuni serta menguasai mengenai sistem data pendapatan serta pembayaran fiskal restoran dikota padang jauh. Sebab pengarang merasa penagihan fiskal restoran ialah salah satu aspek yang berarti di dalam mendapatkan pemasukan fiskal wilayah alhasil pengarang membuat sesuatu informasi kewajiban akhir dengan judul hal“**SISTEM PENGELOLAAN PEMBAYARAN DAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah :

1. bagaimana prosedur pembayaran dan penerimaan pajak restoran pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota padang panjang.
2. Apa dasar pertimbangan walikota padang panjang dalam menerapkan pemungutan pajak restoran dengan tarif 5%

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

1. Gunamenekuni serta memahami metode aplikasi sistem data akuntansi yang bagus dalam lembaga negara.
2. Untuk mengetahui cara pengelolaan pembayan dan penerimaan pajak restoran pada kota padang panjang

1.4 Manfaat Kegiatan Magang

Ada pula manfaat yang diharapkan dari riset ini bagaikan berikut:

1. Bagi Penulis

Riset ini berguna untuk menambah pengetahuan di bidang *sector public* yakni Pemasukan Asli Wilayah/Daerah yang difokuskan kepada pajak restoran dan untuk memenuhi salah satu ketentuan menuntaskan studi pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi instansi yang diteliti

Bagaikan ekstra rujukan dalam menganalisa Desentralisasi dan Kemandirian keuangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

1.5 Tempat dan Waktu

Area yang dipilih yaitu di kantor Badan Pengeleloaan Keuangan dan Aset wilayah kota Padang Panjang. Pelaksanaan magang berlangsung selama dua bulan atau 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dimaksudkan buat membagikan cerminan penyusunan pada laporan kerja praktek. Adapun sistematika penulisan laporan magang ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini hendak mangulas mengenai kata pengantar yang terdiri dari kerangka balik permasalahan, kesimpulan permasalahan, tujuan serta khasiat penyusunan, tempat serta durasi magang, dan penataan penyusunan laporan.

BAB II : Landasan Teori

Didalam bab ini bermuatan mengenai penafsiran sistem data akuntansi, tujuan serta khasiat sistem data akuntansi, penafsiran fiskal, pengelompokan fiskal, tipe fiskal, penafsiran pembayaran serta pendapatan fiskal, dan penafsiran, subjek, bayaran, serta dasar pengenaan fiskal restoran.

BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Mangulas mengenai cerminan biasa industri yang terdiri dari asal usul industri, visi serta tujuan, penjelasan kewajiban serta bentuk badan serta kegiatan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab inimangulas informasi dari data hasil riset yang diolah, berhubungan dengan filosofi yang sudah dipelajari tadinya, gimana informasi hasil riset apakah bisa menanggapi kasus dengan tujuan ulasan dalam alas filosofi yang sudah dipaparkan.

Bab V : Penutup

Bagian ini berisikan kesimpulan serta anjuran anjuran yang diharapkan bisa berguna untuk industri untuk kesinambungan kegiatan industri serta pula berguna buat mahasiswa yang hendak melakukan praktek kegiatan ataupun magang.



